BANTUL-SLEMAN



TPID HARUS BISA KENDALIKAN HARGA

Sambut Nataru, Sleman Jamin Stok Bahan Pokok

SLEMAN (**KR**) - Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) jangan hanya berfokus pada persoalan yang memicu gejolak harga melalui pendekatan yang bersifat jangka pendek.

Namun secara bertahap direncanakan mulai menyentuh pada solusi atas berbagai persoalan yang bersifat struktural seperti peningkatan produktivitas, kelancaran distribusi, dan struktur pasar yang efisien.

"Pada kondisi seperti inilah peran pemerintah melalui TPID sangat diperlukan. Tidak hanya memantau harga, ketersediaan stok dan distribusi bahan pokok yang dibutuhkan masyarakat, tetapi juga untuk mengendalikan laju inflasi serta langkahlangkah yang responsif dan efektif," ungkap Bupati Sleman Kustini saat membuka High Level Meeting di Ho-

tel Crystal Lotus , Kamis (30/11).

Kegiatan tersebut dalam rangka peningkatan peran dan fungsi koordinasi antara stakeholder terkait kesiapan jelang Natal 2023 dan Tahun Baru 2024. Pada kesempatan tersebut dilakukan penandatanganan Keputusan Bupati Sleman tentang Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kabupaten Sleman yang akan mencabut Keputusan Bupati Nomor 9.3 tahun 2018 tentang Tim Pelaksana Pengendalian Inflasi Daerah.

Menurut Bupati, pertemuan tersebut merupakan upaya untuk memantapkan kolaborasi dan sinergi dalam

mengendalikan harga dan menjaga ketersediaan stok atau pasokan kebutuhan pokok di Kabupaten Sleman. Terlebih menyongsong perayaan Hari Natal dan Tahun Baru (Nataru), Pemkab Sleman harus menjamin ketersediaan bahan pokok yang dibutuhkan masyarakat serta mengupayakan harganya terjangkau.

Sementara Kepala Bagian Perekonomian dan SDA Setda Slemam Suyanto melaporkan, Nataru merupakan hari besar yang memiliki pengaruh besar terhadap mekanisme pasar. Tingkat inflasi di DIY berpotensi mengalami kenaikan pada akhir tahun yang disebabkan tingginya peluang kunjungan wisatawan, permintaan terhadap bahan pangan, maupun kebutuhan transportasi.

(Has)-f

Wakapolri: Polri Netral dalam Pemilu

BANTUL (KR) - Polda DIY menggelar Bakti Kesehatan Bhayangkara di Gedung Serba Guna Kampus ISI Jalan Yogya-Parangtritis Bantul, Rabu (29/11). Kegiatan tersebut dalam rangka cooling system Pemilu 2024 di wilayah Polda DIY. Hal ini juga merupakan Implementasi Program Quick Wins Presisi Polri yang dihadiri Wakapolri Komjen Pol Drs Agus Andrianto SH MH.

Wakapolri berharap, di manapun anggota Polri berada harus dekat dengan masyarakat dan harus mampu menjadi bagian yang memberi solusi bagi masyarakat.

"Polri tidak bisa bekerja sendiri, karena itu Polri



KR- ludima

Kegiatan bakti sosial kesehatan di Kampus ISI Sewon Bantul.

tentunya harus menggandeng stakeholder lainnya, seperti pemerintah daerah, kabupaten/kota, unsur TNI yang ada di wilayah, para penggiat profesi kesehatan, pelaku-pelaku usaha sukses di wilayah masing-masing," jelasnya.

Sementara Kapolda DIY Irjen Pol Suwondo Nainggolan SH MH melaporkan, program kegiatan bakti kesehatan, bakti sosial kepada masyarakat sudah banyak sekali dilaksanakan, termasuk bongkar rumah, bantuan sumur, kegiatan operasi katarak, bibir sumbing dan lainnya. (Jdm)-f

Puluhan Peluru Aktif Ditemukan di Kaos Kaki

BANTUL (KR) - Amunisi atau peluru yang diduga masih aktif terdiri dari 87 butir kaliber 9 mm dan 1 butir kaliber 38 mm, serta satu magazen berisi peluru kaliber 9 mm sejumlah 11 butir, ditemukan di gudang rumah Hj Indun di Tegalrejo Srigading Sanden Bantul.

Menurut Kasi Humas Polres Bantul, Iptu I Nengah Jeffry Prana Widnyana, Kamis (30/11), penemuan peluru tersebut berawal, Selasa (28/11) petang, Slamet Hariyadi seorang pengepul barang bekas warga Kedungjati Selopamioro Imogiri dihubungi oleh Hj Indun untuk membersihkan gudang di rumahnya, sekaligus membeli barang bekas.

Slamet Hariyadi mulai membersihkan gudang pa-



KR-Judiman

Peluru yang ditemukan di rumah Hj Indun dihitung oleh petugas Koramil Sanden.

da pukul 17.00 WIB mendapati kaos kaki di dalam gudang yang di dalam kaos kaki tersebut terdapat benda yang dirasa berat. Setelah dicek ternyata benda berat tersebut berupa amunisi atau peluru yang sejumlah 88 butir, terdiri 87 butir kaliber 9 mm dan 1 butir kaliber 38 mm. Di

temukan satu magazen berisi peluru sejumlah 11 butir kaliber 9 mm.

tempat yang sama juga di-

Selanjutnya petugas Polsek Sanden menghubungi Unit Kamneg Sat Intelpam Polres Bantul untuk melakukan pengecekan dan pemeriksaan di lokasi penemuan peluru. (Jdm)-f

14 Orang Ikut Lelang Jabatan Eselon II

SLEMAN (KR) - Sebanyak 14 orang telah mendaftar dalam seleksi atau lelang jabatan eselon II di Pemkab Sleman. Selanjutnya untuk pengumuman seleksi administrasi pada 1 Desember 2023.

Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Kabupaten Sleman Budi Pramono SIP MSi mengatakan, sampai hari terakhir pendaftaran pada 29 November 2023, ada 14 orang yang mendaftar. "Dari 14 orang yang mendaftar, ada 1 orang yang dari luar Sleman. Kemudian tadi sudah rapat pleno seleksi administrasi. Untuk pengumumannya besok (hari ini-red)," katanya di Sleman, Kamis (30/11).

trasi, akan dilaksanakan penelusuran rekam jejak, uji kompetensi manajerial dan sosiokultural, penulisan makalah. Setelah itu presentasi makalah dan wawancara.

Setelah pengumuman seleksi adminis-

"Kami minta para peserta supaya mempersiapkan diri untuk penulisan makalah pada tanggal 4 Desember. Untuk tema ditentukan waktu penulisan," jelas Pramono.

Ditambahkan, proses seleksi jabatan eselon II ini akan berjalan secara transparan. Panitia seleksi ada 7 orang yang terdiri dari Pemkab Sleman, Pemda DIY dan akademisi. (Sni)-f

SATPOL PP BANTUL GALAKKAN PENEGAKAN PERDA Baliho Reklame Tak Berizin dan Membahayakan Dibongkar

BANTUL (KR)- Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Bantul melaksanakan kegiaatan Penegakkan Perda Nomor 10 tahun 2020, perubahan perda nomor 20 tahun 2015 tentang penyelenggaraan Reklame dan Media Informasi.

Pelaksanaan kegiaatan tersebut berupa pembongkaran Baliho papan reklame tidak berizin yang prosedurnya sesuai dengan Perbub No 146 tahun 2022 tentang Petunjuk pelaksanaan Penyelenggaraan Reklame dan media informasi di Kabupaten Bantul.

Selain pembongkaran baliho yang tidak berizin, ada pula papan reklame yang kondisinya sudah membahayakan orang lain, atau pengguna jalan, seperti tiang papan reklame yang sudah keropos, sehingga mudah roboh. bupaten Bantul No 10 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Reklame dan Media Informasi.

Kepala Seksi Penindakan Satpol PP Bantul Sri Hartati SH mengatakan, dalam bulan bulan November 2023 ini pihaknya telah menemukan sejumlah titik pemasangan baliho yang dipergunakan untuk papan reklame yang tidak memilki izin, ada pula yang kondisinya sudah membahayakan, berpotensi roboh apabila diterjang angin kencang.

"Selama 2 hari, mulai Selasa hingga Rabu (28-29/11) kami membongkar 9 baliho papan reklame yang sudah kami petakan sebelumnya, di beberapa lokasi wilayah Banguntapan dan Sedayu," papar Sri Hartati.

layu," papar Sri Hartati. Sesuai dengan Perda Kabupaten Bantul No 10 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Reklame dan Media Informasi. Yang dalam Perda tersebut ada petunjuknya melalui Peraturan Bupati Bantul No 146 Tahun 2022 tentang petunjuk teknis Pelaksanaan Penyelenggara Reklame dan Media Informasi. Sesuai dengan kewenangannya Satpol PP boleh membongkar baliho reklame yang tidak berizin tersebut.

Sebelum dilakukan pembongkaran, pihak Satpol PP telah memberikan peringatan melalui teguran 7 X 24 jam, karena tidak mengindahkan teguran maka Satpol PP berhak melakukan pembongkaran.

Apalagi saat ini sudah memasuki musim penghujan. Pada saat musim penghujan di Bantul sering terjadi angin kencang atau angin puting beliung. Karena itu untuk antisipasi terjadinya bencana karena baliho roboh, maka perlu penertiban baliho yang berpotensi roboh karena tiangnya sudah kropos dan tidak mampu menahan angin kencang.

Pembongkaran baliho reklame ini juga atas rekomendasi dari Tim Penyelenggara Reklame dan Informasi, meliputi Badan Pengelola Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah (BP KPAD) Bantul, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPT SP) Bantul, Dinas Pertanahan dan



Baliho papan reklame di Jln Wates Sedayu tidak berizin terpaksa dibongkar

KR- Judiman



K

dan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Bantul.
Karena itu kepada para penyelenggara baliho atau papan teklame diimbau agar mematuhi aturan, sesuai Perda Kabupaten Bantul No 10 Tahun

2020.

Dalam Perda tersebut diwajibkan setiap penyelenggara reklame dan media informasi di daerah wajib memiliki izin reklame dan media informasi.

Tata Ruang (DPTR), Dinas Pe-

kerjaan Umum Kawasan dan

Permukiman (DPU PT) Dinas

Perhubungan, Bagian Hukum

Dalam memberikan izin dilaksanakan dengan mempertimbangkan lingkungan yang berkaitan dengan aspek keindahan, ketertiban keamanan, kenyamanan, kesusilaan, kesehatan umum dan kepentingan pembangunan daerah.

"Kewajiban penyelenggara papan reklame, selain harus mengurus perizinan, juga harus melaksanakan kewajibannya, yakni membayar pajak dan mengurus retribusi," ungkap Sri Hartati.

Pelanggaran terhadap ketentuan dalam Perda terkait, penyelenggara reklame dapat dikenakan sanksi, berupa peringatan tertulis, penghentian fungsi reklame dan informasi, dan bisa berlanjut pencabutan izin atau pembongkaran.

izin atau pembongkaran .

Sementara terkait dengan pelanggaran baliho politik, yang pemasangan tidak sesuai dengan petunjuk dan aturan yang berhak melakukan penertiban adalah Bawaslu. "Untuk penertiban pemasangan gambar polilik peraturannya berbeda dengan baliho komersial," jelas Sri Hartati. (Jdm)

Baliho yang mengganggu pengguna jalan digulung petugas